

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Tugas Akhir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan ini sepenuhnya menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah memiliki peranan yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan, karena berfungsi sebagai sumber daya finansial untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Secara keseluruhan, pendapatan daerah mencakup berbagai sumber penerimaan, di mana salah satu komponen utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan kontribusi daerah terhadap kemandirian finansial. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya dan kekayaan yang dimiliki. Anggaran pendapatan daerah dibuat untuk menilai sejauh mana anggaran tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam hal ini pendapatan daerah berperan penting guna mendorong pertumbuhan yang lebih baik untuk daerahnya.

Sesuai dengan PSAP Nomor 1 Tahun 2022, Anggaran merupakan pedoman keuangan pemerintah rupiah yang berisi rencana pendapatan, pengeluaran, transfer dana, dan cara pendanaan secara keseluruhan dinyatakan dalam satuan Rupiah. Penyusunan anggaran harus dilakukan secara terstruktur, tepat, dan akurat sehingga mudah dipahami baik bagi penyaji maupun pengguna. Selain itu penetapan besaran anggaran juga harus memperhatikan besaran tarif peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut anggaran Pendapatan Daerah termasuk dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD mencakup rencana penerimaan daerah, alokasi pengeluaran, dan sumber pendanaan. Informasi APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA adalah bagian penting dari laporan keuangan pemerintah daerah yang menampilkan data tentang target dan pencapaian aktual dari pendapatan, belanja, transfer dana, pembiayaan, serta selisih antara penerimaan dan pengeluaran (surplus/defisit).

Dalam konteks pelaksanaan APBD, analisis terhadap kinerja keuangan daerah menjadi penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan mampu terealisasi secara efektif. Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal guna memenuhi kebutuhan serta mendukung operasional sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan daerah tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio keuangan yang berhubungan dengan objek tersebut. Dalam beberapa kasus sering kali terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi, hal ini menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan, karena dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan analisis secara berkala sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Instansi ini memiliki peran strategis dalam mengelola, mengembangkan, dan mengawasi kebijakan serta program di bidang pendidikan formal dan nonformal, pembinaan generasi muda, serta pengembangan olahraga. Dinas Dikpora DIY membawahi beberapa UPT yang berfungsi untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Periode 2020-2024 menjadi masa yang penuh tantangan dalam pengelolaan anggaran Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020-

2021 merupakan saat dimana adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pendapatan daerah. Sementara itu di tahun 2022-2024 menjadi masa pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal nasional maupun daerah. Hal ini tentu memberikan dampak pada pencapaian target pendapatan Dinas Dikpora DIY. Dalam praktiknya, pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan daerah sebagai proyeksi atau target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Proses perencanaan ini didasarkan pada potensi riil dan estimasi ekonomi daerah. Namun, realisasi pendapatan daerah sering kali tidak sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi, baik saat penerimaan kurang dari target (*under-realization*) maupun melebihi target (*over-realization*), perlu dievaluasi secara mendalam untuk memahami faktor penyebabnya dan memastikan perencanaan keuangan daerah berjalan dengan efektif. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, berikut adalah data anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Dinas Dikpora DIY pada Tahun 2020-2024:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Dikpora DIY Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Presentase
2020	2.179.535.102,00	2.456.735.617,00	113%
2021	3.329.079.000,00	3.584.124.414,00	108%
2022	4.525.842.300,00	6.159.027.259,00	136%
2023	6.036.396.000,00	7.623.904.710,00	126%
2024	8.057.737.678,00	10.036.257.045,00	125%

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat adanya fluktuasi dan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah Dinas Dikpora DIY selama periode 2020-2024 yang mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, tugas khir ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja realisasi anggaran pendapatan daerah di Dinas Dikpora DIY pada tahun 2020-2024 dan mengevaluasi faktor-faktor yang

mempengaruhi pencapaian target anggaran pendapatan daerah serta mengukur tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat menjadi sumber referensi informasi terkait APBD pada Dinas Dikpora DIY serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran.

B. Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kinerja pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024?
3. Bagaimana tingkat efektivitas Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2020-2024.
2. Mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024.
3. Mengetahui tingkat efektivitas Pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY selama Tahun 2020-2024..

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa studi, khususnya dalam bidang akuntansi Pemerintah Daerah serta menambah pengalaman dan wawasan dalam dunia kerja mengenai pemerintahan daerah.

2. Bagi Pembaca

Menambah informasi yang lebih transparan mengenai pelaksanaan Pendapatan Daerah pada Dinas DIKPORA DIY, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

3. Bagi Instansi

Membantu mengevaluasi kinerja pelaksanaan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 hingga 2024, selain itu hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

4. Bagi Kampus

Penelitian ini akan memperkaya materi pembelajaran di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya melalui studi kasus nyata Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Hal ini akan membantu mahasiswa lain memahami konsep teori dengan lebih baik karena disajikan dalam konteks praktis.